REALISASI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIPENGARUHI OLEH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TAGIHAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Tegallega 2015-2017)

Pembimbing:
Ely Suhayati

Disusun Oleh:
Annida Fauzia Rahmadita
21114026

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: annida.rahmadita@gmail.com

ABSTRACT

Adjustment of the increase in the number of taxable entrepreneurs registered in the Bandung Tegallega Primary Tax Office has increased and there is an increase in value added tax revenue in the KPP Pratama Bandung Tegallega has increased in year by year The increase in tax bills issued by the Bandung Tegallega Tax Office has always increased year by year . The realization of value added tax revenue in the Bandung Tegallega Primary Tax Office from tends to decrease.

The method used by the author in this study is descriptive method and verification method. Descriptive method is used to find out the description of the amount of PKP, the number of tax collection letters and the value added tax receipt, while the verification is to determine the effect of the number of PKP, the number of tax collection letters and value added tax revenue.

The results of the study revealed that the number of Taxable Entrepreneurs affected positively to the Value Added Tax Revenue and the connection is in average. The results of the study note that the amount of Tax Collection Letter affected positively Value Added Tax Revenue and the connection is in low.

Keywords: Number of Taxable Entrepreneurs, Notice of Period, and Value Added Tax

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia, yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintah, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan negara (Widi Widodo, 2010:1).

PPN dipungut berdasarkan *Self Assessment System*, untuk mencapai target pajak *Self Assessment System* dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak, pihak ketiga yang berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak yang nantinya tersebut akan

disetorkan ke kas negara (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2011:267).

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin meningkat sehingga peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut harusnya juga diimbangi dengan kegiatan pencariannya, untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa untuk merealisasikan penerimaan negara dari sektor pajak (Waluyo 2014:89).

Pemerintah akhirnya memberlakukan UU No 28 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak sehingga terhadap mereka yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dengan adanya Surat Ketetapan Pajak tersebut, maka wajib pajak atau penanggung pajak harus segera melunasi tunggakan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu satu bulan setelah tanggal SKP (Siti Kurnia Rahayu 2013:187). Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Siti Kurnia Rahayu 2013:187).

Jumlah hutang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak atau pun Pengusaha Kena Pajak (Riskon Ginting, 2006). Dalam pelaksanaannya tidak semua wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak melunasi pajak yang terutang tepat waktu (Riskon Ginting, 2006). Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan hutang pajak tersebut belum dilunasi, maka dilakukan penagihan pajak (Riskon Ginting, 2006)

Surat Tagihan Pajak PPN dapat diterbitkan karena PKP tidak melaporkan kewajiban berkaitan dengan PPN, Surat Tagihan Pajak PPN juga dapat diterbitkan karena adanya kesalahan dari WP atau PKP seperti, bukan PKP menerbitkan faktur pajak, faktur pajak tidak lengkap, kesalahan hitung dan lain-lain (Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono, 2009: 277).

Salah satu fungsi penagihan pajak sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karna itu tindakan Penagihan Pajak harus dilakukan efektif dan efisien untuk menjaga keamanan penerimaan pajak (Ida Zuraida dan Hari Sih Advianto, 2011:38).

"Realisasi Penerimaan PPN Yang Dipengaruhi Oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak Dengan Surat Tagihan Pajak".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami peningkatan di beberapa bulan tetapi di bulan yang sama realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami penurunan, dan begitu juga sebaliknya.
2. Surat Tagihan Pajak (STP) mengalami peningkatan dibeberapa bulan tetapi di bulan yang sama realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami penurunan, dan begitu juga sebaliknya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Seberapa besar pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dan konsep-konsep yang telah diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai:

1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pengaruh Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengusaha Kena Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2013: 25), menyatakan bahwa:

> "Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan transaksi barang dan jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang tahun 1984 batasannya berdasarkan keputusan Menteri Keuangan kecuali wajib pajak yang memutuskan untuk dijadikan sebagai PKP".

Sedangkan menurut Menurut Sardana (2014: 26) pengertian pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan transaksi yang dikenai pajak berlandaskan dari undang-undang perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.1.2 Pengusaha Kena Pajak

Indikator Pengusaha Kena Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Sardana (2014: 26) yang mengatakan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan transaksi yang dikenai pajak berlandaskan dari undang-undang perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penentuan indikator ini juga didasari atas dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2017: 252) yang mengatakan bahwa:

> "Semua wajib pajak yaitu pengusaha yang kegiatannya masuk ke dalam Pajak Pertambahan Nilai berlandaskan undang-undang perpajakan Pajak Pertambahan Nilai harus mendaftar dan dikukuhkan menjadi seorang PKP".

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menentukan indikator dari Pengusaha Kena Pajak yaitu besarnya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada KPP.

2.1.2 Surat Tagihan Pajak (STP)

2.1.2.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak

Penagihan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:116) adalah:

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat tagihan pajak, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Surat Tagihan Pajak (STP) menurut pasal 1 UU KUP, yaitu :

"Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda".

2.1.2.2 Indikator Surat Tagihan Pajak

Indikator Surat Tagihan Pajak (STP) dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Moeljohadi, SH. di dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2013: 197) menyatakan bahwa:

"Serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Terdapat 4 unsur pengertian Penagihan Pajak salah satunya yaitu serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya Surat Tagihan, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan, Pengumunan lelang serta Pelelangan"

Berdasarkan pemikiran diatas, indikator untuk Penagihan Pajak yaitu Jumlah Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan/diberitahukan kepada wajib pajak oleh DJP.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan Pajak menurut Supramono & Theresia Woro Damayanti (2010) adalah:

"Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat, naik turunnya penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2016: 3) adalah:

"Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti contohnya PPN".

Menurut Waluyo (2014: 5) menyatakan bahwa:

"Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu menggali sumber dana yang berasal dari pajak".

Berdasarkan pengertian ketiga ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sumber penerimaan negara yang terdiri dari semua pajak atas barang kena pajak/jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam daerah pabean (dalam negeri).

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran (Siti Resmi, 2016: 3) Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti contohnya PPN. Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada penelitian ini juga menggunakan dasar pemikiran Waluyo (2014: 5) menyatakan bahwa untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu menggali sumber dana yang berasal dari pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menentukan indikator dari Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu jumlah realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Siti Resmi (2016:5) adalah:

> "Dengan banyakanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, (2011:231) menyatakan bahwa:

> "Semakin banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang patuh dengan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak penghasilan maka semakin meningkatnya pnerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Negara".

Teori ini juga didukung dari hasil penelitian Imas Masruroh (2015) menyimpulkan bahwa:

> "Dengan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sehingga akan menambah penerimaan PPN. Jumlah pengusaha kena pajak (PKP) memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, misalnya faktor ekonomi dan faktor pertumbuhan penduduk atau angka kelahiran.".

2.2.2 Pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2014:68), bahwa:

> "Penagihan pajak dengan surat tagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:187) adalah:

> "Surat Tagihan Pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan diedarkannya surat tagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pertambahan nilai".

Teori ini juga didukung dari hasil penelitian Yohanes Kresna (2014) dan Dedy Setya Utama Pansiangan (2014) yang mengungkapkan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN sebagai tindakan penagihan pajak memiliki pengaruh positif (searah) dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PPN. Karena semakin banyak Surat Tagihan Pajak PPN yang diterbitkan akan menambah penerimaan PPN sehingga realisasi penerimaan PPN bisa tercapai.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H1 : Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H2 : Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

III. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Metode ini diharapkan dapat mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan kemudian mendapatkan kesimpulan yang akan menjelaskan gambaran objek yang akan diteliti.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini variabel independen (X) yaitu:

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
b. Surat Tagihan Pajak (STP)

Sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa jumlah pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di KPP, jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan pada KPP, dan jumlah nominal realisasi dari penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan kepustakaan. Caranya dengan membaca buku-buku karangan para ahli yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dan dengan mengumpulkan data-data yang telah diolah oleh pihak yang berwewenang menjadi informasi untuk mengolah data yang dibutuhkan.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa, dan jumlah nominal penerimaan yang berasal dari pajak atau realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dari tahun 2014-2016.

3.4.2 Penarikan Sampel

Peneliti mendapatkan sampel dari data laporan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa tahun 2014-2016. Jumlah sampel yaitu 36 laporan bulanan diperoleh dari data perbulan (12 bulan) dalam 3 periode mengenai jumlah surap pemberitahuan, jumlah pengusaha kena pajak terdaftar dan hasil realisasi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40223, Indonesia.

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dengan tahap persiapan sampai tahap pelaporan hasil penelitian atau dimulai pada Februari 2018 sampai dengan Agustus 2018.

3.5 Metode Pengujian Data

Pengujian data yang digunakan peneliti dalam melakukan analisa terhadap data yang didapat adalah dengan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji korelasi, dan uji koefisien determinasi.

3.6 Hipotesis

H1: Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
H2: Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk membantu mendapatkan kesimpulan.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Gambaran Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Jumlah Pengusaha Kena Pajak dari tahun 2014-2016, dimana rata-rata Jumlah Pengusaha Kena Pajak tertinggi sebesar 156,5 pada tahun 2016, sedangkan rata-rata Jumlah Pengusaha Kena Pajak terendah sebesar 129,5 terdapat pada tahun 2014. Adapun pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa perkembangan Jumlah Pengusaha Kena Pajak dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.1.1.2 Gambaran Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak dari tahun 2014-2016, dimana rata-rata Surat Tagihan Pajak tertinggi sebesar 566 terdapat pada tahun 2016, sedangkan rata-rata Surat Tagihan Pajak terendah sebesar 62 terdapat pada tahun 2014. Adapun pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa perkembangan Surat Tagihan Pajak dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.1.1.3 Gambaran Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN dari tahun 2014-2016, dimana rata-rata Penerimaan PPN tertinggi sebesar 27,294 miliar terdapat pada tahun 2016, sedangkan rata-rata Penerimaan PPN terendah sebesar 19,328 miliar terdapat pada tahun 2014. Adapun pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa perkembangan Penerimaan PPN dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Pada bagian ini sebelum dilakukannya pembentukan model regresi, terlebih dahulu hal yang dilakukan adalah pengujian asumsi klasik sagar model yang terbentuk memberikan estimasi yang tidak bias dan akurat. Pengujian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

a. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan tabel output, uji *Klomogrov-Smirnov*, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,738 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh, nilai *tolerance* kedua variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF semua variabel < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada data.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan output yang diperoleh, hasil uji *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Dari hasil perhitungan diperoleh angka DW sebesar 2,040. Setelah melihat tabel statistik Durbin-Watson (n=36 dan k=2), diperoleh batas bawah nilai tabel (d_L) = 1,354 dan batas atasnya (d_U) = 1,587. Berpedoman pada kriteria umum yang telah disebutkan diatas, karena nilai DW sebesar

2,404 berada diantara du (1,587) dan 4-d_U (2,413), maka dapat dipastikan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

4.1.2.2 Analisis Linier Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel dapat di peroleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: $Y = 1{,}327 + 4{,}089X_1 + 1{,}108X_2$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Artinya jika kedua variabel bebas (X) bernilai konstan (nol) maka Penerimaan PPN (Y) akan bernilai sebesar 1,327.
b. Artinya jika Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1) meningkat sebesar satu dan variabel lainnya konstan, maka Penerimaan PPN (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 4,089.
c. Artinya jika Surat Tagihan Pajak (X2) meningkat sebesar satu dan variabel lainnya konstan, maka Penerimaan PPN (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,108.

4.1.2.3 Analisis Korelasi Parsial

Hasil *output SPSS*, terlihat bahwa Hubungan antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan Penerimaan PPN adalah sebesar 0,708 termasuk dalam hubungan yang kuat, nilai korelasi bertanda positif yang menujukan hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya setiap terjadi peningkatan Jumlah Pengusaha Kena Pajak akan meningkatkan Penerimaan PPN.

Hasil *output SPSS* terlihat bahwa Hubungan antara Penerimaan PPN dengan Penerimaan PPN adalah sebesar 0,639 termasuk dalam hubungan yang kuat, nilai korelasi bertanda positif yang menujukan hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya setiap terjadi peningkatan Penerimaan PPN akan meningkatkan Penerimaan PPN.

4.1.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel, diperoleh informasi bahwa R-*square* sebesar 0,753 atau 21,7%. Nilai tersebut menunjukan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Tagihan Pajak secara simultan dalam memberikan pengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN sebesar 21,7%. Sedangkan sisanya sebesar 100%-21,7% = 78,3% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Secara parsial berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh terbesar 18,4% berasal dari variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak sedangkan variabel Surat Tagihan Pajak memberikan pengaruh sebesar sebesar 13,7%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis Parsial

a. Pengujian Hipotesis Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan grafik 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai t-hitung (2,253) variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak berada pada daerah penolakan H_0 atau daerah signifikan, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN.

b. Pengujian Hipotesis Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan grafik 4.8 di atas dapat dilihat bahwa nilai t-hitung (5,255) variabel Surat Tagihan Pajak berada pada daerah penolakan H_0 atau daerah signifikan, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan PPN.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 18,40% artinya 81,60% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya hubungan antara Pengusaha Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0,429 termasuk dalam hubungan yang sedang, nilai korelasi bertanda positif menunjukan

bahwa hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya setiap terjadi peningkatan Pengusaha Kena Pajak akan diikuti oleh semakin meningkatnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi bahwa dapat dilihat penyesuaian kenaikan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega mengalami peningkatan pada tahun 2014 - 2015. Apabila ditinjau lagi berdasarkan teori, semakin tinggi jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak dengan memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Siti Resmi, 2016:5). Tetapi pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Bandung Tegallega mengalami penurunan dari tahun 2014 ke 2015. Lalu pada tahun 2016 pun realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai masih belum tercapai tetapi mengalami peningkatan dari tahun 2015 dari yang awalnya mengalami penurunan 19,5% naik ditahun berikutnya dengan mengalami penurunan 11,8% di tahun 2016. Hal ini terjadi dikarenakan meskipun banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dalam KPP Tegallega tetapi tidak melakukan kewajiban pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arif Nurrokhman (2016: 14) didalam penelitiannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari menyatakan bahwa jumlah pengusaha berpengaruh positif tetapi tidak secara signifikan dipengaruhi oleh pemakaian jasa konsultan perpajakan, sehingga pajak yang dibayarkan dibuat seminimal mungkin, maka jumlah pengusaha kena pajak tercatat tidak berpengaruh secara signifikan pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan hasil analisis verifikatif dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi diharapkan agar wajib pajak semakin banyak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama agar dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan juga diberikan sosialisasi bagaimana tata cara dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai sehingga para Pengusaha Kena Pajak pun tidak perlu menyewa jasa konsultan pajak yang bisa meminimkan tarif pajak yang harus dibayarkan.

4.2.2 Pengaruh Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 13,76% artinya 86,24% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya hubungan antara penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0,371 termasuk dalam hubungan yang rendah, nilai korelasi bertanda positif menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya setiap terjadi peningkatan Pengusaha Kena Pajak akan diikuti oleh semakin meningkatnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Peningkatan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Tegallega selalu bertambah dari tahun ke tahun. Jika ditinjau dari teori yang ada, setiap terjadi peningkatan penerbitan Surat Tagihan Pajak akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. (Mardiasmo, 2013:45), tetapi pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Bandung Tegallega mengalami penurunan dari tahun 2014 ke 2015. Dimana pada tahun 2014 realisasi yang tercapai adalah 14,5% tetapi

di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 19,5% dikarenakan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai. Sehingga selisih antara realisasi 2014 ke 2015 mengalami penurunan mencapai 34% . Lalu pada tahun 2016 pun realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai masih belum tercapai tetapi mengalami peningkatan dari tahun 2015 dari yang awalnya mengalami penurunan 19,5% naik ditahun berikutnya dengan mengalami penurunan 11,8% di tahun 2016. Hal ini terjadi dikarenakan meskipun banyaknya Surat Tagihan Pajak yang sudah di terbitkan oleh KPP Tegallega dan diberikan kepada Wajib Pajak tetapi tidak melakukan kewajiban pajaknya sebagai Wajib Pajak sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN namun belum tentu akan menambah penerimaan PPN. Hasil Penelitian menyatakan bahwa jumlah STP berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian verifikatif bahwa Penagihan Pajak dengan Penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi KPP sebagai instansi yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak harus melakukan pengawasan terhadap WP yang sudah siberikan Surat Tagihan Pajak tersebut. Sehingga para WP yang menerima Surat Tagihan Pajak tersebut segera untuk melakukan kewajibannya dan diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak dalam sektor Pajak Pertambahan Nilai.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan pada Bab IV, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega tahun 2014-2016, dimana ketika Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar naik maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega tahun 2014-2016, dimana setiap kenaikan Surat Pemberitahuan Masa yang diterbitkan maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa, dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

5.2.1 Saran Praktis

1. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega melalui Pengusaha Kena Pajak disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega lebih sering lagi melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang sudah memenuhi kriteria untuk mendaftar dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak agar jumlahnya meningkat dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ikut meningkat.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegallega yang memiliki penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang rendah dikarenakan jumlah pengusaha kena pajak yang rendah pula,

sebaiknya untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mensosialisasikan kepada para pengusaha yang sudah memenuhi kriteria pengusaha kena pajak yang tertulis di Menteri Keuangan.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para pembaca.
2. Bagi Peneliti Lain
   Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan variabel yang berbeda, unit, dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharismi. (2009). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Damayanti, Theresia Woro & Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan.* Yogyakarta: ANDI.

Ginting, Riskon. 2006. *Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan*. Jurnal Ekonomi & Bisnis, Volume 5 Nomor 1.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Kedelapan.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kresna, Yohanes. 2014. *Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Masruroh, Imas. 2016. *Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus di KPP Pratama Majalaya 2010 – 2014).*

Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Yogyakarta: ANDI.

Nurrokhman, Arif. 2013. *Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Gayamsari)*

Nursanti, Ika dan Yazid Yud Padmono. 2013. *Pengaruh Self Assessment System Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai.* Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 1, N0. 1.

Pandiangan, Dedy Setya Utama. 2014. *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Perambahan Nilai (PPN).* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep*

Hukum Pajak (Edisi 2). Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Priantara, Diaz (2012). *Perpajakan Indonesia (Edisi 3).* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, Siti Kurnia & Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 20.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosdiana, Haula & Edi Slamet Irianto. 2011. *Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Visimedia.

Santoso, Singgih. 2011. *Structural Equation Modeling (SEM) Konsep dan Aplikasi dengan AMOS 18.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia

Sari, Vivi Novita dan Siti Khairani. 2012. *Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat*.

Sekaran, Uma. 2014. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business) Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sitio, Rohmasari. 2016. *Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilaidi KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Sukardji, Untung. 2005. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*.Yogyakarta: Andi Offset.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial Sebagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana

Trisnayanti, Ida Ayu Ivon & I Ketut Jati. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara.*

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta.

Zuraida, Ida & Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak*. Bogor: Ghalia Indonesia.